

Arahan Pengembangan untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Development Directions to Reduce Regional Disparities Between Regencies/Cities in Banten Province

Muhamad Rizki Waluya^{1*}, Janthy T. Hidayat², Novida Waskitaningsih³

^{1,2,3} Universitas Pakuan, Indonesia

*e-mail korespondensi: rizkiwaluya88@gmail.com

Info Artikel

Diterima: 2 Februari 2024

Direvisi: 17 Juni 2024

Disetujui: 17 Juli 2024

Cara Sitasi:

Waluya, R.W., Hidayat, J.T. & Waskitaningsih, N. (2024). Arahan Pengembangan untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. *Jurnal Jendela Kota*, Vol 1 (1), 1-13. doi:.....



ABSTRAK

Ketimpangan ekonomi antar wilayah merupakan permasalahan yang cukup serius karena dapat diartikan sebagai kemiskinan dan ketimpangan. Indikasi ketimpangan antar daerah terjadi di Provinsi Banten. Adanya indikasi ketimpangan dapat menghambat proses pembangunan secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik perekonomian, menganalisis sektor-sektor unggulan, menganalisis ketimpangan antar kabupaten/kota, dan merumuskan arah pembangunan untuk mengurangi tingkat ketimpangan di wilayah Provinsi Banten. Metode analisis yang digunakan adalah kontribusi PDRB, laju pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, Tipologi Klassen, Analisis Gabungan LQ dan DLQ, Indeks Williamson, dan analisis deskriptif untuk menghasilkan arah pembangunan guna mengurangi ketimpangan yang terjadi di Provinsi Banten. Hasil penelitian ini adalah Kabupaten Lebak merupakan daerah tertinggal dan ditetapkan sebagai lokasi prioritas pembangunan dalam penelitian ini. Arah pembangunan dibagi dalam enam kriteria: (1) Peningkatan sektor pendukung untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian sehingga dapat mempunyai nilai tambah; (2) Peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan agar sumber daya manusia di Kabupaten Lebak mampu bersaing dengan pencari kerja dari daerah lain; (3) Meningkatkan sarana dan prasarana melalui pemerataan jangkauan sarana dan prasarana pemukiman; (4) Meningkatkan porsi pendapatan daerah selain pajak melalui investasi dan kerjasama dengan beberapa pihak swasta; (5) Meningkatkan aksesibilitas dengan meningkatkan kualitas, serta 6) Mempercepat realisasi rencana jalan tol dan rencana jalur kereta api untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi dan pariwisata, guna menciptakan

konsentrasi pertumbuhan ekonomi di kawasan baru. Selain itu, karena wilayahnya cukup luas, maka perlu dipertimbangkan kembali usulan pemekaran wilayah Kabupaten Lebak karena dapat mengurangi tingkat ketimpangan wilayah karena pemerataan pembangunan dapat lebih mudah dicapai dengan wilayah pemerintahan yang lebih kecil.

Kata Kunci: arahan pengembangan, daerah terbelakang, karakteristik ekonomi, kesenjangan wilayah, sektor unggulan

ABSTRACT

Economic inequality between regions is a quite serious problem, because economic inequality means poverty and inequality. Indications of inter-regional inequality also occur in Banten Province. The existence of indications of inequality can hamper the development process in general. This research aims to analyze economic characteristics, analyze leading sectors, analyze inequality between districts/cities, and formulate development directions to reduce the level of inequality in the Banten Province region. The analytical methods used are PDRB contribution, PDRB growth rate, PDRB per capita, Klassen Typology, Combined LQ and DLQ Analysis, Williamson Index, and descriptive analysis to produce a development direction to reduce inequality that occurs in Banten Province. The results of this research are that Lebak Regency is a disadvantaged area and was designated as a priority location for development in this research. The development directions are divided into six criteria: (1) Increasing supporting sectors to increase the contribution of the agricultural sector so that it can have added value. (2) Increasing human resources by improving education and skills so that human resources in Lebak Regency can compete with job seekers from other areas. (3) Improving facilities and infrastructure by equalizing the reach of residential facilities and infrastructure. (4) increasing the share of regional income other than taxes through investment and collaborating with several private parties. (5) Increasing accessibility by improving quality, as well as accelerating the realization of the Toll Road Plan and Railway Route Plan to support the development of economic and tourism areas, in order to create a concentration of economic growth in new areas. and (6) because the area is quite large, it is necessary to reconsider the regional expansion proposal because it can reduce the level of regional inequality because equitable development can be more easily achieved with a smaller government area.

Keywords: development, economic characteristics, leading sectors, regional disparities, underdeveloped areas

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh setiap negara berkembang yang dalam usaha pembangunannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata akan diikuti dengan peningkatan taraf hidup masyarakat, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan. Kemajuan ekonomi tidak akan terjadi secara serentak di berbagai daerah. Apabila di suatu terjadi pembangunan maka di daerah sekitarnya merupakan awal dari pembangunan. Oleh karena itu pembangunan ditujukan untuk mengatasi masalah kesenjangan antar daerah (*regional disparity*) demi tercapainya sasaran pembangunan nasional, serta meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah untuk masyarakat yang adil dan merata. Ketimpangan pembangunan pada dasarnya adalah ketimpangan ekonomi yang mengandung makna kemiskinan dan kesenjangan. Agar ketimpangan dan perkembangan antar daerah tidak menciptakan jurang yang semakin lebar, maka implikasi kebijakan terhadap pembangunan harus dirumuskan secara tepat (Suryana, 2000).

Salah satu provinsi yang tidak terlepas dari masalah ketimpangan wilayah adalah Provinsi Banten. Provinsi Banten terletak paling barat Pulau Jawa. Berbatasan dengan ibukota negara DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat membuat Provinsi Banten menjadi daerah paling strategis. Provinsi Banten merupakan provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000 dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 dan menjadi provinsi ke-28 di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan keunggulan strategis dari sisi lokasi, membuat perekonomian Banten bergerak cepat dan tumbuh dari tahun ke tahun.

Walaupun letak provinsi ini sangat strategis, kontribusi PDRB Provinsi Banten terhadap PDRB se-Pulau Jawa 2021 hanya sebesar 6,78%. (BPS, 2021). Berdasarkan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 terdapat ketidakseimbangan pertumbuhan (*imbalance growth*) antarwilayah Banten Selatan (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak) dan Wilayah Banten Utara (Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan). Hal tersebut dapat dilihat dari ketidaksetaraan antar nilai PDRB masing-masing kabupaten/kota, dimana pada wilayah Banten Utara pada tahun 2021 kontribusi PDRBnya sebesar 91,08%. Sementara itu di Banten Selatan pada tahun yang sama hanya berkontribusi 8,92% terhadap PDRB Provinsi.

Pemerintah Provinsi Banten menilai permasalahan ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota ini menjadi salah satu permasalahan yang harus dicarikan solusinya. Hal tersebut dapat dilihat dalam salah satu misi Provinsi Banten yaitu "Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi". Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi Banten dengan memperkuat investasi (*pro investment*) di berbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan.

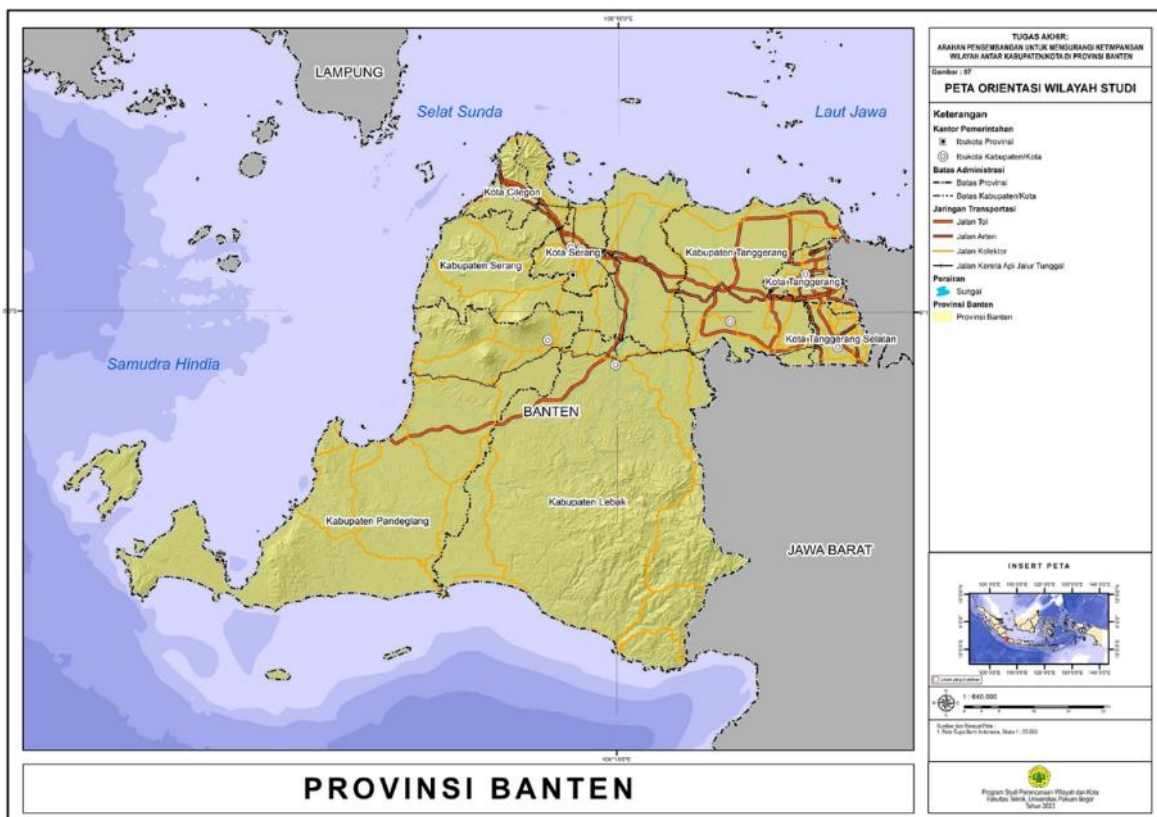
Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik perekonomian masyarakat, menganalisis sektor unggulan, menganalisis ketimpangan antar kabupaten/ kota, serta merumuskan arah pengembangan untuk mengurangi tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi arah pengembangan untuk mengatasi permasalahan ketimpangan wilayah di Provinsi Banten.

Studi dan penelitian mengenai ketimpangan wilayah telah banyak dilakukan, beberapa di antaranya: Marta (2011) menganalisis tingkat ketimpangan wilayah dengan menggunakan Indeks Williamson. Penelitian ini cukup menarik karena selain melihat tingkat ketimpangan wilayah juga melihat beberapa faktor, diantaranya melihat sektor-sektor unggulan, tingkat perkembangan dan karakteristik wilayah, dan menganalisis penyebab terjadinya ketimpangan wilayah. Faktor-faktor tersebut digunakan peneliti untuk menjadi dasar dalam merumuskan arahan pengembangan wilayah menggunakan analisis deskriptif. Selvia (2021) menganalisis pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulan di Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dengan menggunakan alat analisis Location Quotient (LQ), analisis Shift Share, analisis gabungan LQ dan DLQ, analisis pola pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengetahui gambaran tentang struktur pertumbuhan masing-masing daerah. Utama (2022) menganalisis sektor unggulan dan laju pertumbuhan sektor pada wilayah SWP Jonggol Kabupaten Bogor dengan menggunakan analisis *Location Quotient (LQ)* dan analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) yang nantinya dari kedua

analisis tersebut digabungkan (*overlay*) sehingga memunculkan sektor/ kegiatan ekonomi yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi.

METODE

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 dengan lokasi penelitian di Provinsi Banten. Provinsi ini memiliki luas wilayah 966.292 Ha dengan Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi. Berada di bagian paling barat Pulau Jawa, Provinsi Banten memiliki 4 kabupaten dan 4 kota, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan. Untuk lebih jelasnya, ruang lingkup wilayah dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Provinsi Banten

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (Provinsi Banten dalam Angka 2017 - 2021) dan Bappeda Provinsi Banten (data RPJM dan RTRW). Analisis yang digunakan adalah kontribusi PDRB agar dapat mengetahui struktur perekonomian atau peran setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah; pertumbuhan ekonomi untuk mengetahui aktivitas ekonomi suatu daerah; PDRB perkapita berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah; tipologi klasen untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan sektoral daerah; analisis gabungan antara nilai SLQ dan DLQ sebagai kriteria dalam menentukan apakah sektor ekonomi tergolong unggulan, potensial, berkembang dan tertinggal, Indeks Williamsons untuk menentukan tingkat

disparitas perekonomian antar wilayah, serta analisis deskriptif untuk perumusan arahan pengembangan. Rincian tujuan, metode, data, dan sumber data dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tujuan Penelitian, Variabel, Teori, Kebutuhan Data, dan Sumber Data

Tujuan Penelitian	Teknik Analisis	Variabel	Data	Sumber
Menganalisis karakteristik perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Banten	• Kontribusi PDRB	PDRB Provinsi dan Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB Kab/Kota, Provinsi. • Jumlah Penduduk per Kab/Kota, Provinsi. 	BPS Provinsi Banten (2021)
	• Pertumbuhan Ekonomi	PDRB Kab/Kota		
	• PDRB Per kapita	PDRB dan Jumlah Penduduk Kab/Kota		
	• Tipologi Klassen	Pendapatan per kapita dan pertumbuhan PDRB Provinsi dan Kab/Kota		
Menganalisis sektor unggulan kabupaten/kota di Provinsi Banten	• Analisis Location Quotient (LQ)	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB Kab/Kota, Provinsi. • Rerata dan Pertumbuhan PDRB per Sektor Kab/Kota, Provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB Kab/Kota, Provinsi. • Jumlah Penduduk per Kab/Kota, Provinsi. 	BPS Provinsi Banten (2021)
	• Analisis Dynamic Location (DLQ)			
	• Analisis Gabungan LQ & DLQ			
Menganalisis ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten	• Indeks Williamson	• PDRB Per kapita Kab/Kota, Provinsi dan Jumlah penduduk per Kab/Kota, Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB Kab/Kota, Provinsi. • Jumlah Penduduk per Kab/Kota, Provinsi 	BPS Provinsi Banten (2021)
Merumuskan arahan pengembangan untuk mengurangi tingkat ketimpangan wilayah Provinsi Banten.	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis penentuan lokasi prioritas • Analisis deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi PDRB • Pertumbuhan PDRB • PDRB Per kapita • Tipologi Klassen • Analisis Gabungan LQ & DLQ 	Hasil analisis Kontribusi PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per kapita, Tipologi Klassen, Analisis Gabungan LQ dan DLQ	
		Kebijakan Pemerintah	RTRW Prov.Banten Th. 2023-2043	Perda Prov.Banten (2023)
		Kriteria Penetapan Daerah Tertinggal	Permen DPDTT Nomor 11 Tahun 2020	Peraturan Menteri DPDTT (2020)

HASIL PEMBAHASAN

Karakteristik Perekonomian Wilayah

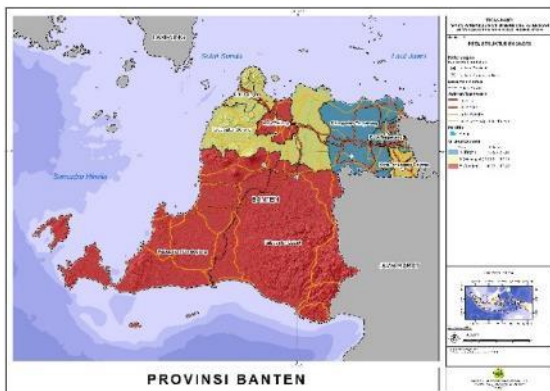
a. Struktur PDRB

Daerah yang memiliki Struktur PDRB terbesar yaitu Kota Tangerang (23%) dan Kabupaten Tangerang (21%) dikarenakan kedua daerah ini merupakan daerah dengan struktur ekonominya bersumber dari sektor sekunder, terutama sektor Industri Pengolahan. Sementara itu, Kabupaten Pandeglang (4%) dan Lebak (4%) merupakan daerah dengan penyumbang PDRB terkecil terhadap provinsi dikarenakan kedua daerah ini memiliki sektor utama yang bersumber dari sektor primer, terutama sektor

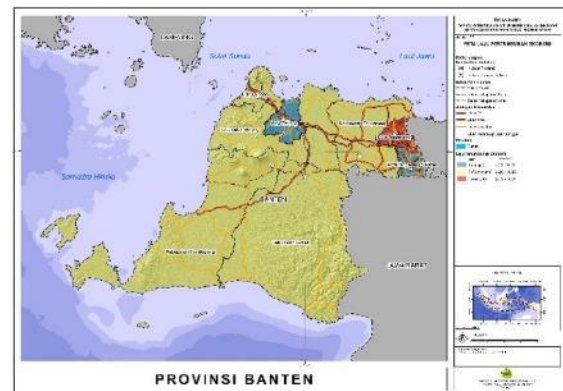
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Daerah lain yang berkontribusi kecil terhadap provinsi yaitu Kota Serang (5%). PDRB daerah ini bersumber dari sektor tersier terutama sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Maka dapat disimpulkan bahwa pada Provinsi Banten, daerah dengan sektor utama bersumber dari sektor sekunder cenderung memiliki kontribusi PDRB yang lebih besar dibandingkan daerah dengan sektor utamanya bersumber dari sektor primer dan tersier. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada periode 2017-2021 adalah sebesar 3,57%. Terdapat kabupaten/kota dengan nilai laju pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan provinsi, yaitu yang terbesar dimiliki oleh Kota Tangerang Selatan sebesar 5,19%, Kota Serang sebesar 4,35%, Kota Cilegon dengan 4,15%, Kabupaten Lebak sebesar 3,79%, Kabupaten Pandeglang 3,64%, dan Kabupaten Tangerang sebesar 3,61%. Untuk kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan lebih kecil dibandingkan provinsi terdapat di Kota Tangerang dengan nilai 2,32% dan Kabupaten Serang sebesar 3,36%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 2. Peta Hasil Skoring Struktur Ekonomi



Gambar 3. Peta Hasil Skoring Laju Pertumbuhan Ekonomi

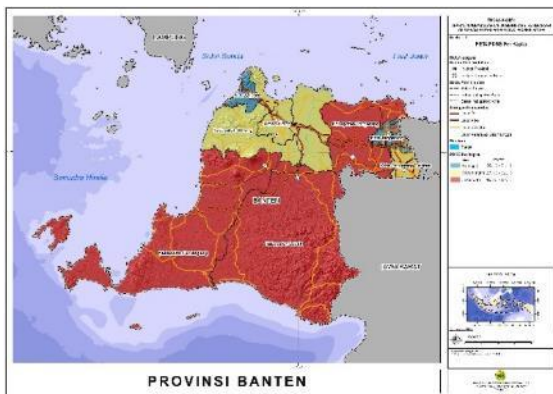
c. PDRB Perkapita

Dari hasil analisis diketahui bahwa rerata PDRB perkapita Provinsi Banten pada kurun waktu 2017-2021 sebesar Rp. 35.790.000. Bila dilihat dari masing-masing kabupaten/kota terdapat perbedaan pendapatan perkapita yang cukup signifikan, seperti Kota Cilegon yang mempunyai PDRB perkapita yang sangat tinggi dengan rerata sebesar Rp. 166.619.000. Hal ini dikarenakan nilai total PDRB Kota Cilegon yang tinggi dengan jumlah penduduk di daerah tersebut yang relatif sedikit dan sebagai daerah dengan sumber PDRB terbesar berasal dari sektor industri pengolahan sebesar 60%. Hal ini dikarenakan oleh adanya PLTU Suralaya yang merupakan salah satu PLTU terbesar di Indonesia menjadi pemasok kelistrikan di Jawa-Bali dan Pelabuhan Merak yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatra. Untuk daerah dengan nilai PDRB perkapita paling rendah di Provinsi Banten terdapat di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang dengan rerata nilai PDRB perkapita hanya sebesar 15 juta yang mana sektor ekonominya terkonsentrasi pada sektor pertanian dan pertambangan. Selain itu, masih terdapat beberapa daerah dengan nilai PDRB perkapita di bawah nilai PDRB perkapita

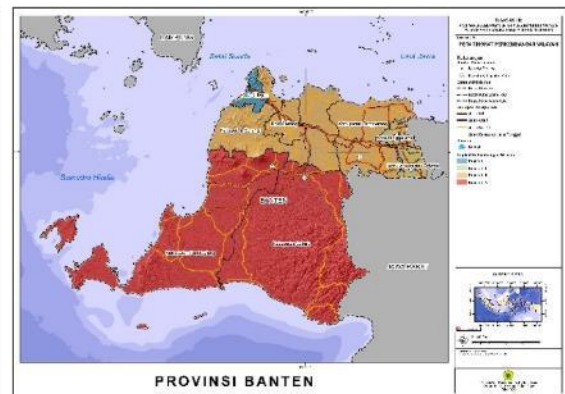
Provinsi Banten yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Serang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.

d. Tipologi Klassen

Berdasarkan hasil analisis *Tipologi Klassen* diperoleh hasil untuk kategori wilayah maju adalah Kota Cilegon. Untuk wilayah kategori maju tapi tertekan atau kuadran II adalah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Kategori Daerah Berkembang atau Kuadran III adalah Kabupaten Tangerang, Kota Serang, dan Kabupaten Serang. Sementara itu, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak memperoleh kategori daerah tertinggal dikarenakan memiliki pendapatan perkapita dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah dibandingkan dengan provinsi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 4. Peta Hasil Skoring PDRB per Kapita



Gambar 5. Peta Hasil Analisis Tipologi Klassen

Sektor Unggulan Wilayah

Berdasarkan hasil analisis gabungan LQ dan DLQ dapat diketahui bahwa Wilayah Banten Selatan, yaitu Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak yang dalam RTRW Provinsi Banten peruntukannya sebagai kawasan pertanian, pertambangan, kehutanan, dan perkebunan, memiliki sektor unggulan yang didominasi pada sektor Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Penggalian. Sementara wilayah Banten Utara, yaitu Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan didominasi oleh sektor unggulan berupa industri pengolahan; konstruksi, transportasi dan pergudangan dikarenakan di wilayah Banten utara memang diperuntukkan untuk kawasan industri, perdagangan dan jasa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Sementara di Kota Tangerang Selatan berdasarkan analisis gabungan LQ dan DLQ tidak memiliki sektor unggulan, dikarenakan 9 sektor potensial yang dimiliki Kota Tangerang Selatan mempunyai laju pertumbuhan sektor yang kurang baik, sehingga menjadikan 9 sektor tersebut menjadi sektor yang tidak prospektif. Hal ini disebabkan oleh sektor potensial yang terdapat di daerah ini adalah sektor tersier dimana pada tahun penelitian ini terjadi peristiwa *Pandemi Covid 19* yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM sehingga terjadi kelumpuhan ekonomi di bidang perdagangan dan jasa pada tahun 2019-2021.

Tabel 2. Sektor Unggulan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	Sektor Unggulan	SLQ	DLQ
Kabupaten Pandeglang	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,72	1,29
	Pertambangan dan Penggalian	12,11	1,24
	Transportasi dan Pergudangan	1,08	14,97
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,27	1,26
Kabupaten Lebak	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,66	1,13
	Transportasi dan Pergudangan	1,09	4,78
Kabupaten Tangerang	Konstruksi	1,32	1,25
Kabupaten Serang	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,58	1,16
	Industri Pengolahan	1,44	1,04
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,09	2,34
Kota Tangerang	Industri Pengolahan	1,07	2,72
	Transportasi dan Pergudangan	2,19	2,56
	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,00	20,28
	Jasa Perusahaan	1,05	15,88
Kota Cilegon	Industri Pengolahan	1,77	4,94
	Pengadaan Listrik dan Gas	3,12	1,06
Kota Serang	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,01	1,05
Kota Tangerang Selatan			

Tingkat Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Bila Indeks Williamson mendekati 0 artinya ketimpangan kecil atau lebih merata dan jika nilai Indeks Williamson mendekati 1 maka artinya ketimpangan semakin besar atau ketimpangan tersebar. Perhitungan besaran nilai ketimpangan pembangunan ini menggunakan data PDRB perkapita serta jumlah penduduk, sehingga besaran ketimpangan masing-masing tahun dapat diketahui. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Indeks Williamson Provinsi Banten Tahun 2017-2021

Tahun	Indeks Williamson
2017	0,627
2018	0,628
2019	0,627
2020	0,631
2021	0,634
Rerata	0,630

Rerata Indeks Williamson Provinsi Banten selama periode 2017-2021 berkisaran 0,630. Indeks ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,634 dan terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 0,627. Indeks Williamson Provinsi Banten ini tergolong kesenjangan ekonomi taraf tinggi. Adapun kontribusi setiap kabupaten/kota terhadap ketimpangan yang terjadi di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Indeks Williamson Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2017-2021

Tahun	Indeks Williamson Kabupaten/ Kota							
	Kabupaten				Kota			
	Pandeglang	Lebak	Tangerang	Serang	Tangerang	Cilegon	Serang	Tangerang Selatan
2017	0,21	0,21	0,24	0,09	0,03	0,47	0,07	0,10
2018	0,20	0,21	0,25	0,09	0,02	0,47	0,07	0,10
2019	0,20	0,21	0,25	0,08	0,02	0,47	0,07	0,10
2020	0,22	0,24	0,21	0,12	0,04	0,47	0,08	0,03
2021	0,23	0,24	0,21	0,12	0,04	0,47	0,08	0,03
Rerata	0,21	0,22	0,23	0,10	0,03	0,47	0,08	0,07

Ketimpangan ini terjadi karena masing-masing kabupaten/kota memiliki sumber daya dan infrastruktur yang berbeda-beda dimana hal tersebut berpengaruh terhadap besarnya PDRB perkapita di setiap daerah. Lebih lanjut, hal ini juga berpengaruh kepada kontribusi setiap daerah terhadap ketimpangan yang terjadi di Provinsi Banten. Daerah dengan PDRB perkapita yang tinggi atau pun rendah dari PDRB perkapita provinsi memiliki kontribusi ketimpangan yang tinggi. Akan tetapi daerah dengan PDRB perkapita yang mendekati PDRB perkapita provinsi memiliki nilai kontribusi ketimpangan yang rendah.

Arahan Pengembangan untuk Mengurangi Tingkat Ketimpangan Wilayah Provinsi Banten

Untuk mengurangi tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi daerah tertinggal sebagai daerah prioritas pembangunan untuk mengurangi tingkat ketimpangan. Diasumsikan bahwa apabila wilayah tertinggal tersebut dapat dikembangkan maka tingkat ketimpangan wilayah atau perbedaan pembangunan antar wilayah di Provinsi Banten akan berkurang dikarenakan tidak adanya tingkat perbedaan pembangunan antar wilayah atau relatif sama.

Penentuan Lokasi Prioritas Pembangunan

Untuk mengetahui daerah tertinggal maka dilakukan pembobotan dengan nilai skor yang digunakan, yaitu 1 (tinggi), 3 (menengah), dan 5 (rendah). Nilai skor diperoleh berdasarkan perhitungan analisis yang sudah didapatkan dengan melakukan interval kelas nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi dengan jumlah nilai kelas yang digunakan. Semakin besar skor yang diperoleh maka dapat dikatakan daerah tersebut merupakan daerah tertinggal. Setelah dilakukan pembobotan dapat diketahui bahwa Kabupaten Lebak merupakan daerah tertinggal di Provinsi Banten. Hal ini dikarenakan setelah dilakukan pembobotan Kabupaten Lebak memperoleh skor 25 atau termasuk dalam kelas interval Daerah Tertinggal. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil penentuan lokasi prioritas dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Skoring Penentuan Lokasi Prioritas Pembangunan

Kabupaten/ Kota	Karakteristik Ekonomi				Sektor Unggulan	Jumlah	Penetapan Wilayah
	Struktur PDRB	Laju Pertumbuhan	PDRB perkapita	Tipologi Wilayah			
Kabupaten Pandeglang	5	3	5	7	1	21	Wilayah Berkembang

Kabupaten/ Kota	Karakteristik Ekonomi				Sektor Unggulan	Jumlah	Penetapan Wilayah
	Struktur PDRB	Laju Pertumbuhan	PDRB perkapita	Tipologi Wilayah			
Kabupaten Lebak	5	3	5	7	5	25	Wilayah Tertinggal
Kabupaten Tangerang	1	3	5	5	5	19	Wilayah Berkembang
Kabupaten Serang	3	3	3	5	3	17	Wilayah Berkembang
Kota Tangerang	1	5	1	3	1	11	Wilayah Maju
Kota Cilegon	3	3	1	1	5	13	Wilayah Maju
Kota Serang	5	1	3	5	5	19	Wilayah Berkembang
Kota Tangerang Selatan	3	1	3	3	5	15	Wilayah Maju

Identifikasi Kondisi Kabupaten Lebak

1. Kondisi Kabupaten Lebak berdasarkan Kebijakan

- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043

Rencana Pembangunan di Kabupaten Lebak antara lain pembangunan jalan tol, terminal penumpang tipe A, rencana jaringan jalur kereta api, penetapan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dengan luas total kawasan 9.454 Ha.

- Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 81/Dpd Ri/Iv/2013-2014 tentang Pandangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang Undang Tentang Pembentukan Kabupaten Cilangkahan di Provinsi Banten.

Luas Kabupaten Lebak seluas 35% dari luas Provinsi Banten. Dengan kondisi tersebut pada tahun 2014 DPR RI membuat RUU terkait Kabupaten Cilangkahan sebagai DOB pemekaran Kabupaten Lebak karena kurang meratanya pembangunan ekonomi, jumlah sarana dan prasarana pada daerah yang jauh dari ibukota kabupaten atau wilayah selatan Kabupaten Lebak. Wilayah Kabupaten Cilangkahan meliputi 10 dari 28 kecamatan dengan luas wilayah Kabupaten Cilangkahan mencapai 157.215 Ha atau sekitar 47% dari luas Kabupaten Lebak, calon ibukota Kabupaten Cilangkahan di Kecamatan Malingping.

Arahan Pengembangan Daerah Tertinggal Kabupaten Lebak

Arahan pengembangan dikelompokkan sesuai dengan kriteria yang tercantum Peraturan Menteri DPDTT Nomor 11 Tahun 2020 tentang Indikator Penetapan Daerah Tertinggal. Berdasarkan kriteria tersebut dibuat suatu arahan yang dapat mengurangi ketimpangan di Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Lebak. Dengan demikian, dapat terjadi pemerataan di seluruh provinsi. Adapun arahan pengembangan di Kabupaten Lebak dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Matriks Perumusan Arahan Pengembangan Daerah Tertinggal

No	Karakteristik	Arahan
1	Perekonomian Masyarakat	

No	Karakteristik	Arahan
	Perekonomian Kabupaten Lebak pada Tahun 2017-2021 memiliki rerata laju pertumbuhan ekonomi yang sedikit lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan ekonomi provinsi, akan tetapi dari kontribusi PDRB dan PDRB Perkapita daerah ini merupakan daerah paling tertinggal dibanding daerah lain. Hal ini dibuktikan oleh analisis Tipologi Klassen yang menunjukkan bahwa daerah ini memperoleh Kuadran IV atau Daerah Tertinggal	Peningkatan sektor penunjang seperti sektor industri pengolahan, perdagangan, dll, untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian sehingga hasil dari sektor pertanian dapat memiliki nilai lebih yang dapat meningkatkan pendapatan PDRB perkapita masyarakatnya.
Sumber daya Manusia		
2	Laju pertumbuhan IPM dari 2017 – 2021 selalu mengalami pertumbuhan yang positif. Akan tetapi Kabupaten Lebak merupakan daerah dengan IPM terendah di Provinsi Banten	Peningkatan lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan serta peningkatan ketrampilan untuk setiap SDM yang merata di seluruh Kabupaten Lebak. Dikarenakan pada RTRW Provinsi Tahun 2023-2043 sudah ditetapkan kawasan peruntukan Industri pada Kabupaten Lebak maka perlu adanya persiapan SDM agar dapat bersaing dengan para pencari kerja dari luar daerah. Peningkatan SDM pada bidang pertanian juga penting mengingat Kabupaten Lebak memiliki kawasan LP2B yang cukup luas.
Sarana dan Prasarana		
3	Berdasarkan analisis skalogram, jumlah infrastruktur di Kabupaten Lebak kurang memadai, khususnya kecamatan yang berada di selatan Kabupaten Lebak	Peningkatan pemerataan jangkauan sebaran sarana dan prasarana ke seluruh kecamatan terutama wilayah perdesaan dan pedalaman melalui pemerataan fasilitas, khususnya daerah yang masih sulit dijangkau.
Kemampuan Keuangan		
4	Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian dan rasio ketergantungan APBD, dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak masih mengandalkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dikarenakan pendapatan asli daerah belum mampu memenuhi kebutuhan daerahnya.	Peningkatan upaya penerimaan bagian pendapatan daerah selain pajak dengan penyertaan investasi daerah lainnya yang dapat ditempuh melalui inventaris dan bekerja sama dengan beberapa pihak swasta terkait potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Lebak.
Aksesibilitas		
5	Masih rendahnya konektivitas antarwilayah karena terlalu luasnya wilayah Kabupaten Lebak sehingga rendahnya konektivitas dengan daerah pusat pertumbuhan, terutama melalui jalur transportasi darat dimana kondisi jalan hanya 38% dalam kondisi baik, sementara 62% dalam kondisi sedang sampai rusak berat dengan perkerasan 77% Aspal. Disisi lain Kabupaten Lebak memiliki rencana jaringan jalan tol Serang – Panimbang dan Usulan Ujung Kulon – Pelabuhan Ratu yang melewati Kabupaten Lebak ditambah adanya rencana jalur kereta api Pandeglang – Rangkasbitung	Peningkatan kualitas dan ketersediaan jalan dan jembatan serta mempercepat realisasi rencana jalan tol dan rencana jalur kereta api sehingga terkoneksi terhadap daerah yang terpencil dan terisolir. Dengan demikian dapat tercipta konsentrasi pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut sehingga Jumlah penduduk akan meningkat dengan adanya urbanisasi ke wilayah tersebut.

No	Karakteristik	Arahan
	(Ciseparang) dan Rangkasbitung – Saketi – Labuan.	
	Karakteristik Fisik	
6	Wilayah Kabupaten Lebak didominasi oleh perbukitan/ pergunungan antara 0 sampai dengan di atas 1.000 mdpl. Dengan luas wilayah 330.500 Ha atau 35% dari luas provinsi, hal ini mengakibatkan terhambatnya pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, pengelolaan potensi daerah. Dengan demikian, munculnya usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) Cilangkahan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Akan tetapi pemekaran wilayah dapat membebani APBN pusat karena biaya operasional DOB cenderung lebih tinggi daripada pendapatan daerahnya.	Dikarenakan luas wilayah yang cukup besar, perlu adanya pemekaran wilayah untuk dapat mengurangi tingkat ketimpangan karena pemerataan pembangunan dapat lebih mudah dicapai, khususnya di wilayah Lebak Selatan yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten, yaitu Kecamatan Rangkasbitung. Akan tetapi perlu dipertimbangkan kesiapan DOB Cilangkahan dalam kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan sarana dan prasarana, jumlah penduduk. Disisi lain terdapat dampak negatif bila DOB ini tidak bisa bersaing dengan daerah lain yang nantinya dapat membebani APBN pusat karena biaya operasional DOB cenderung lebih tinggi daripada pendapatan daerahnya.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada Provinsi Banten, daerah dengan struktur ekonomi bersumber dari sektor primer seperti Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak cenderung menjadi daerah tertinggal, sedangkan daerah dengan struktur ekonomi bersumber dari sektor sekunder dan tersier memiliki kecenderungan sebagai daerah berkembang hingga daerah maju.

Dari hasil perhitungan LQ dan DLQ, Daerah Banten Selatan didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor transportasi dan pergudangan. Sementara daerah utara didominasi oleh sektor yang lebih variatif, antara lain sektor industri pengolahan, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor konstruksi, sektor jasa perusahaan dan sektor pengadaan listrik dan gas. Sementara itu terdapat daerah yang tidak memiliki sektor unggulan yaitu Kota Tangerang Selatan dikarenakan pada tahun 2017-2021, 9 sektor potensial yang dimiliki Kota Tangerang Selatan mempunyai laju pertumbuhan sektor yang kurang baik, sehingga menjadikan 9 sektor tersebut menjadi sektor yang tidak prospektif. Hal ini disebabkan oleh sektor potensial yang terdapat di daerah ini adalah sektor tersier dimana pada tahun penelitian ini terjadi peristiwa Pandemi Covid 19 yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM sehingga terjadi kelumpuhan ekonomi dibidang perdagangan dan jasa pada tahun 2019-2021.

Tingkat ketimpangan Provinsi Banten selama periode 2017-2021 berkisaran 0,630. Indeks ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,634 dan terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 0,627. Indeks Williamson Provinsi Banten ini tergolong kesenjangan ekonomi taraf tinggi.

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini diketahui bahwa Kabupaten Lebak menjadi daerah prioritas pembangunan dikarenakan masih tertinggalnya pembangunan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur dibanding daerah lain pada Provinsi Banten.

Adapun rekomendasi hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Perlunya perhatian khusus terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta membuat kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan pada sektor ini, mengingat sektor tersebut

memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap perekonomian di Kabupaten Lebak dan memiliki keunggulan kompetitif; b) Pemerintah dapat meningkatkan kinerja dan tanggung jawab dinas terkait serta melakukan pendampingan secara serius bagi para petani. Selain itu meningkatkan sarana dan prasarana pertanian di Kabupaten Lebak agar dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja para petani; c) Perlunya perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait dengan percepatan infrastruktur di Kabupaten Lebak, khususnya daerah yang masih sulit dijangkau di Kabupaten Lebak, guna mendukung aksesibilitas perkotaan dan roda perekonomian, agar dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2017-2021). *Provinsi Banten Dalam Angka 2017-2021*. <https://banten.bps.go.id/publication.html>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2021). *Analisis Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah 2017-2021*. <https://jateng.bps.go.id/publication/2022/07/22/fd072b0452eee87b279fa708/analisis-indeks-williamson-provinsi-jawa-tengah-2017-2021.html>
- Marta, R. (2011). *Analisis Spasial Disparitas Pembangunan Antar Wilayah di Provinsi Sumatra Barat*. INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri. (2020). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Pemerintah Daerah Provinsi Banten. (2017). *Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043*. Pemerintah Daerah Provinsi Banten
- Pemerintah Daerah Provinsi Banten (2019). *Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022*. Pemerintah Daerah Provinsi Banten
- Selvia, P. (2021). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Sektor Unggulan Di Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Suryana, M. S. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Salemba Empat.
- Utama, M. R. (2022). Arah Pengembangan Sektor Unggulan Dalam Mendukung Pengembangan Wilayah Di SWP Jonggol Kabupaten Bogor. *JOM (Jurnal Online Mahasiswa) Bidang Perencanaan Wilayah & Kota Universitas Pakuan, Vol 1, No.1*